



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

---



Scan untuk Unduh

---

**Bersinergi Untuk Negeri, Menjaga #UangKita**





"Selama dua tahun terakhir, kami sukses membuat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja secara sinergis, dengan melakukan pendekatan bersama, analisa bersama, audit bersama, investigasi bersama,"

**Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati**

# RINGKASAN EKSEKUTIF



Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp279,94 triliun atau 15,67 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 6,68 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp262,42 triliun.



PNBP membukukan realisasi sebesar Rp70,04 triliun atau 18,52 persen dari target APBN tahun 2019.



Realisasi belanja negara mencapai Rp452,06 triliun atau 18,37 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 7,75 persen (yoy) dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018.



TKDD mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,09 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.



Realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp101,96 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp31,38 triliun.

**P**elaksanaan APBN 2019 sampai dengan 31 Maret secara umum masih menunjukkan tren positif baik di sisi Pendapatan maupun Belanja Negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan APBN 2019. Pada tataran global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 diproyeksikan akan berada pada tingkat yang rendah. World Economic Outlook (WEO) bulan April 2019 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat ke tingkat 3,3 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi pada WEO bulan Januari 2019 sebesar 3,5 persen. Selain itu, volume perdagangan global diperkirakan mengalami tekanan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi AS, Eropa dan Tiongkok, perang dagang yang

masih berlangsung antara AS dan Tiongkok, serta ketidakpastian geopolitik termasuk isu Brexit. WEO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil pada level 5,2 persen.

**Kinerja APBN hingga akhir Maret 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik.** realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp350,10 triliun (16,17 persen terhadap target APBN 2019), atau tumbuh sebesar 4,90 persen secara yoy. Realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp279,94 triliun, PNPB sebesar Rp70,04 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp112,7 miliar atau masing-masing telah mencapai 15,67 persen, 18,52 persen, dan 25,89 persen terhadap target yang ditetapkan dalam APBN 2019.

**Penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai masing-masing mencapai Rp248,98 triliun dan Rp30,97 triliun. Berdasarkan target pada APBN 2019, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 15,78 persen atau mampu tumbuh sebesar 1,82 persen (yoy).** Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan positif PPh Nonmigas sebesar 7,52 persen (yoy) dan PPh Migas sebesar 26,46 persen (yoy). Realisasi komponen penerimaan PPh Nonmigas didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 OP, PPh 21, PPh 25/29 Badan, dan PPh 22; yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 21,37 persen (yoy), 15,48 persen (yoy), 15,38 persen (yoy), dan 13,24 persen (yoy). Di sisi lain, penerimaan PPh Migas masih tercatat tumbuh cukup signifikan sebesar 26,46 persen (yoy).

**Penerimaan komponen Pajak Nonmigas yang berasal dari PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp89,94 triliun atau tumbuh negatif 8,88 persen (yoy).** Perlambatan terbesar berasal dari PPN/PPnBM DN dan PPnBM Impor yang tumbuh negatif masing-masing sebesar 15,05 persen (yoy) dan 13,80 persen (yoy). Namun demikian, pertumbuhan PPN dan PPnBM pada akhir Maret 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Februari 2019 sebesar negatif 10,40 persen (yoy). Faktor yang menekan pertumbuhan PPN/PPnBM adalah pertumbuhan restitusi yang cukup signifikan sebesar 46,2 persen (yoy) yang disebabkan oleh adanya kebijakan percepatan

pembayaran restitusi, pembayaran restitusi normal, dan adanya putusan banding. Kebijakan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan stimulus kepada perekonomian.

**Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 14,83 persen dari target dalam APBN 2019 atau tumbuh cukup signifikan sebesar 73,04 persen (yoy).** Pertumbuhan kepabeanan dan cukai didorong karena tumbuhnya penerimaan cukai yang signifikan dan pertumbuhan penerimaan bea masuk, walaupun untuk bea keluar justru mengalami pertumbuhan menurun. Secara umum pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai didukung oleh faktor aktivitas perdagangan internasional, dampak positif kebijakan melalui program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta masih relatif tingginya harga komoditas internasional. Selain itu, kinerja positif penerimaan kepabeanan dan cukai juga menjadi salah satu indikasi masih terjaganya aktivitas ekspor impor dan pertumbuhan industri di dalam negeri.

**Secara lebih detail, komponen dari penerimaan kepabeanan dan cukai mayoritas menunjukkan kinerja penerimaan dan pertumbuhan yang positif.** Pertumbuhan penerimaan yang baik ini didorong pula oleh kebijakan pelunasan pita cukai dan tidak adanya perubahan tarif pada tahun 2019. Realisasi penerimaan cukai mencapai 12,90 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019, atau tumbuh 165,11 persen

(yoy). Pertumbuhan penerimaan cukai utamanya bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang tercatat tumbuh signifikan sebesar 189,14 persen (yoy). Pertumbuhan CHT yang signifikan merupakan dampak dari pertumbuhan produksi hasil tembakau, kebijakan pergeseran pembayaran cukai, dan dampak positif program PCBT. Lebih lanjut, untuk cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) realisasi penerimaannya tercatat tumbuh sebesar 13,26 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh adanya kenaikan tarif cukai MMEA. Sedangkan, penerimaan cukai etil alkohol (EA) mengalami pertumbuhan negatif 16,51 persen (yoy). Penurunan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi alkohol dan adanya kenaikan tarif MMEA yang juga turut menekan pertumbuhan produksi etil alkohol yang notabene merupakan bahan dasar dalam pembuatan minuman beralkohol.

**Penerimaan bea masuk menunjukkan kinerja yang positif, baik dari sisi realisasi penerimaan maupun pertumbuhan.** Untuk realisasi penerimaan, bea masuk sudah mencapai 21,96 persen dari target APBN 2019. Sementara dilihat dari pertumbuhannya, bea masuk masih tumbuh positif sebesar 1,56 persen (yoy). Faktor pendorongnya yaitu aktivitas impor yang masih mampu menyebabkan kenaikan devisa impor bayar. Selain itu, dampak positif atas implementasi program PIBT juga turut mendorong pertumbuhan komponen penerimaan dari bea

masuk. Penerimaan bea keluar masih menunjukkan kinerja yang menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dilihat dari sisi capaian penerimaan, bea keluar terealisasi sebesar 24,34 persen dari target APBN 2019 atau tumbuh negatif 24,76 persen (yoy). Penurunan kinerja bea keluar dipengaruhi utamanya oleh kinerja ekspor komoditas minerba akibat berkurangnya ekspor dari Freeport dan beberapa perusahaan tambang besar yang menurun produksinya akibat mulai memasuki tahap investasi awal kembali pada tahun 2019. Faktor lainnya yang turut menekan pertumbuhan bea keluar adalah dampak bea keluar 0 persen atas ekspor CPO (*Crude Palm Oil*).

**Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai bulan Maret 2019 telah mencapai Rp70,04 triliun atau 18,51 persen dari target APBN tahun 2019.** Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan PNBP pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp71,04 triliun. Realisasi Penerimaan PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp34,89 triliun atau 18,29 persen dibandingkan target dalam APBN 2019, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp35,99 triliun. Penerimaan SDA antara lain dipengaruhi oleh tren pergerakan harga komoditas khususnya *Indonesia Crude Price* (ICP) dan Harga Acuan Batubara (HBA). Rata-rata ICP bulan Januari-Maret 2019 tercatat sebesar USD60,49 per barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai USD63,02 per barel. Sementara itu, rata-rata HBA pada periode Januari-Maret 2019 mencapai USD91,59 per ton, juga lebih rendah dibandingkan HBA periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD99,36 per ton. Di sisi lain, realisasi PNBPN Lainnya pada periode yang sama mencapai Rp25,77 triliun atau sebesar 27,4 persen dari target APBN 2019, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai Rp24,87 triliun. Pendapatan BLU pada Triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp9,38 triliun atau 19,6 persen dari APBN 2019, lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp10,14 triliun. Meskipun capaian PNBPN cukup positif, Pemerintah senantiasa mewaspadai perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang sensitif terhadap PNBPN.

**Sejalan dengan komitmen Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN,** antara lain melalui perbaikan pola belanja agar dapat lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional, penyerapan belanja negara menunjukkan kinerja yang semakin baik. **Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2019 mencapai Rp452,06 triliun (18,36 persen dari pagu APBN 2019) atau tumbuh 7,75 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp260,74 triliun (15,96 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp191,33 triliun (23,14 persen dari pagu APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga bulan Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,45 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN antara lain melalui perbaikan pola belanja agar dapat lebih optimal menstimulasi perekonomian nasional. Meningkatnya kinerja Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya didorong oleh realisasi belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp36,97 triliun atau sekitar 36,24 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja bantuan sosial hingga bulan Maret 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 106,62 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain karena adanya kenaikan indeks bantuan yang signifikan pada Program Keluarga Harapan.

Pertumbuhan positif belanja bantuan sosial turut mendukung stimulus ke perekonomian melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I tahun 2019. Selain itu, pemberian bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan jaminan perlindungan sosial dan daya beli masyarakat.

**Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2019 mencapai Rp21,83 triliun atau 9,73 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.**

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp20,13 triliun dan subsidi nonenergi Rp1,69 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Maret 2019 lebih rendah Rp3,47 triliun atau 13,70 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Lebih rendahnya realisasi subsidi dimaksud antara lain dikarenakan pada tahun 2018 terdapat pembayaran sebagian kekurangan subsidi energi tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi periode sampai dengan Maret 2019 hanya meliputi pembayaran subsidi energi bulan Januari dan Februari.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp181,24 triliun (23,94 persen) dan Dana Desa Rp10,09 triliun (14,41 persen).**

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp176,05 triliun (24,29 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp5,00 triliun (50,04 persen), dan Dana Otonomi

Khusus dan Keistimewaan DIY Rp0,18 triliun (0,81 persen). Realisasi TKD sampai dengan Maret 2019 tersebut lebih tinggi Rp5,92 triliun atau sekitar 3,38 persen (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Maret 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) penyaluran DAU yang lebih tinggi 3,87 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran kembali DAU beberapa daerah yang telah menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD); (2) realisasi DBH yang meningkat sekitar 18,21 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, salah satunya karena peningkatan realisasi DBH Sumber Daya Alam hingga Triwulan I 2019; serta (3) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah sebesar 85,13 persen (yoy) apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya penyaluran lebih cepat hingga Triwulan I 2019. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Maret 2019 lebih rendah Rp0,20 triliun (-1,92 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi penyerapan Dana Desa hingga Maret 2019 yang belum optimal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I oleh Pemkab/ Pemkot sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

**Realisasi defisit APBN hingga Maret 2019 mencapai Rp101,96 triliun atau sekitar 0,63 persen PDB.** Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Maret 2019 berada pada posisi negatif Rp31,38 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Maret 2019 mencapai Rp177,45 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp177,86 triliun atau sekitar 49,51 persen dari APBN. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) (neto) sebesar Rp185,83 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp7,97 triliun. Pemerintah menerapkan strategi frontloading penerbitan SBN dengan memanfaatkan likuiditas awal tahun dan tingginya minat investor, serta mengantisipasi kewajiban utang jatuh tempo yang cukup besar pada bulan Maret hingga Mei 2019, telah turut mendukung tercapainya target SBN bruto yang ditetapkan pada APBN 2019 selama Triwulan I. **Dengan penerbitan SBN tersebut, posisi utang Pemerintah per akhir Triwulan I mencapai Rp4.567,31 triliun atau 30,12 persen terhadap PDB,** yang masih lebih rendah dari batas maksimum sebesar 60 persen sebagaimana Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang yang prudent dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan prudent, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian. Pada gilirannya, akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

● Infografis

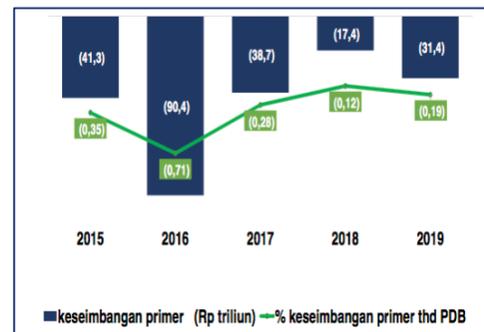
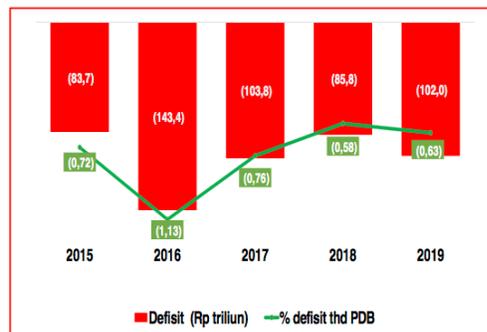
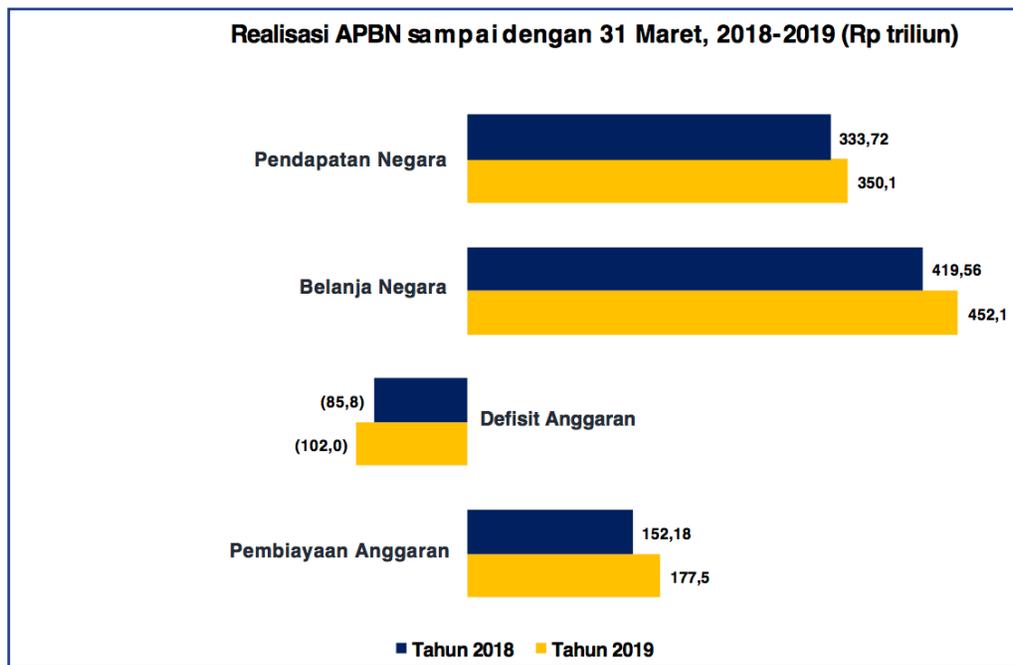
## REALISASI APBN 2019 s/d 31 Maret 2019

	APBN 2019	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd APBN
 <b>PENDAPATAN NEGARA (A)</b>	2.165,11	350,10	16,17%
 <b>BELANJA NEGARA (B)</b>	2.461,11	452,06	18,37%
 <b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(20,11)	(31,38)	156,03%
 <b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(296,00)	(101,96)	34,45%
 <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	296,00	177,45	59,95%

dalam triliun Rupiah

**Realisasi APBN sampai dengan Maret 2019**

Perkembangan realisasi APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara mampu tumbuh 4,91 persen (yoy) dan belanja negara meningkat 7,75 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran terkendali pada level 0,63 persen terhadap PDB.



Secara ringkas realisasi APBN 2019 periode sampai dengan 31 Maret 2019 adalah sebagai berikut: Pendapatan negara mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp350,10 triliun atau 16,17 persen dari target APBN tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp333,72 triliun. Adapun rincian realisasi pendapatan negara meliputi:

- Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp279,94 triliun atau 15,67 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 6,68 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp262,42 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
  - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp248,98 triliun atau 15,78 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 1,82 persen (yoy).
  - Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp30,97 triliun atau 14,83 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 73,04 persen (yoy).

- PNBP membukukan realisasi sebesar Rp70,04 triliun atau 18,52 persen dari target APBN tahun 2019.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp452,06 triliun atau 18,37 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 7,75 persen (yoy) dibandingkan realisasi APBN pada

periode yang sama tahun 2018. Realisasi tersebut terdiri atas:

- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp260,74 triliun atau 15,95 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh 11,45 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,09 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.
- TKDD mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 3,09 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

Dengan capaian pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp101,96 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp31,38 triliun. Realisasi Defisit APBN tahun 2019 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp85,83 triliun atau 0,58 persen PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp17,37 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Maret 2019 sebesar Rp177,45 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp2,00 triliun, maka terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp75,5 Triliun.

# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga, prospek optimis perekonomian terus berlanjut

**P**rospek pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2019 menunjukkan kondisi yang optimis, melanjutkan momentum pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2018. Prospek optimisme atas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh perkembangan Indeks kepercayaan konsumen (IKK) dalam 3 bulan pertama tahun 2019 berada pada level optimis, yakni di atas 100 dan di Maret 2019 pada level 124,5. Sementara itu, Survei Penjualan Eceran yang mengindikasikan perkembangan penjualan eceran pada bulan Februari mampu tumbuh 9,1 persen. Kondisi ini ditopang oleh stabilitas ekonomi yang kuat dengan terjaganya tingkat inflasi dan tren penguatan nilai tukar Rupiah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah melalui pertumbuhan belanja negara juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun 2019. Secara keseluruhan dalam tahun

2019, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan masih stabil ditengah prospek perlambatan pertumbuhan global. Namun, risiko yang perlu tetap diperhatikan adalah posisi defisit transaksi berjalan.

**Perkembangan harga di tingkat konsumen pada bulan Maret 2019 mencerminkan terjadinya inflasi terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas hortikultura. Inflasi pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,11 persen (mtm), atau mencapai 0,35 persen (ytd) dan 2,48 persen (yoy).** Komponen volatile food melanjutkan tren menurun yang didorong oleh deflasi komoditas beras seiring masuknya masa panen raya padi, turunnya harga ikan segar karena faktor cuaca yang mendukung tangkapan, serta melimpahnya pasokan daging dan telur ayam ras. Sementara itu, produk hortikultura mengalami inflasi

karena berkurangnya pasokan akibat gangguan cuaca dan distribusi serta terlambatnya izin impor. Komponen inti masih bergerak stabil yang mencerminkan tetap terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran. Komponen *administered price* relatif stabil dipengaruhi oleh dampak lanjutan penurunan harga bensin nonsubsidi dan tarif listrik.

**Tren penguatan Rupiah masih berlanjut dan per 10 April 2019 nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat pada level Rp14.155 per dolar Amerika Serikat.** Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,14 (ytd) persen dibandingkan awal tahun 2019. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh derasnya arus modal asing ke dalam negeri dan kepastian akan kebijakan suku bunga acuan The Fed di tahun 2019. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia berada pada level

yang cukup tinggi, yakni sebesar USD124,5 miliar pada akhir Maret 2019, meningkat dibandingkan posisi akhir Februari 2019 sebesar USD123,3 miliar. Posisi cadangan devisa ini masih setara dengan pembiayaan 7 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini akan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

**Pembangunan sektor pariwisata yang dilaksanakan selama ini mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.** Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan dan penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang juga terus mengalami

14

peningkatan. Pada Februari 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebesar 1,27 juta naik 6,12 persen dibanding jumlah kunjungan pada Februari 2018. Secara kumulatif, hingga Februari 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 2,48 juta kunjungan. Pemerintah menargetkan kedatangan wisman pada tahun 2019 sebesar 20 juta kunjungan atau naik sebesar 26,53 persen dari jumlah kunjungan tahun 2018 sebesar 15,8 juta, dengan target pemasukan devisa sebesar USD17,6 miliar.

**Dalam merespon dinamika perekonomian global, Pemerintah tetap berupaya mengantisipasi risiko-risiko yang ada dengan memperkuat fundamental ekonomi**

**kedepan.** Penguatan posisi Transaksi Berjalan tetap akan memperoleh perhatian yang besar. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan jangka pendek untuk memperbaiki transaksi berjalan yaitu dengan perbaikan iklim usaha yang berorientasi ekspor melalui pelayanan perizinan terintegrasi *Online Single Submission (OSS)*, fasilitas insentif perpajakan, dan pengembangan vokasi. Hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan yang diharapkan akan mampu menopang aktifitas ekonomi dan bisnis yang berorientasi ekspor. Diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar juga diperlukan dalam mendorong ekspor nasional.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*



Foto:  
Biro KLI

## Sinergi Demi Negeri dengan Joint Program DJP-DJBC-DJA

### Kerjasama adalah keniscayaan

**F**itrah manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa bekerja sendirian. Berangkat dari fitrah itu, maka kami meyakini bahwa bekerja sama adalah suatu keniscayaan. Dengan perubahan informasi dan teknologi, terutama di era revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Bea cukai, telah membuat beberapa ukuran demi terciptanya proses yang mapan. Proses tersebut adalah konektivitas lintas sektor.

Ada beberapa ciri evolusi industri 4.0, seperti artificial inteligent, internet of things, hingga big data. Namun demikian yang terpenting dari semua ciri tersebut adalah konektivitas. Bea cukai menyadari bahwa tidak mungkin mencapai sesuatu tanpa melakukan kerjasama dengan pihak lain. Meskipun menjadi rahasia umum bahwa kerjasama atau koordinasi adalah hal yang mudah diwacanakan namun sulit implementasinya.

Menteri Keuangan dalam berbagai kesempatan kerap menyampaikan bahwa APBN adalah sebuah instrumen atau alat, bukan tujuan. APBN adalah instrumen negara untuk mencapai kesejahteraan. Karena

hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat tersentuh oleh APBN, mulai dari kelahiran, kehidupan sehari-hari, hingga kematian.

Bea cukai sebagai salah satu unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), turut andil dalam pembentukan APBN tersebut. Akan tetapi, andil tersebut (dahulu) lebih diartikan bahwa Bea cukai bertanggung jawab semata-mata sebagai pengumpul penerimaan negara. Tanggung jawab itu menjadikan Bea cukai berlaku seperti layaknya pemanen buah. Kondisi pohon yang kering atau terkena hama tidak menjadi perhatian, selama dapat memanen buah sebanyak-banyaknya.

### Perubahan paradigma

Bea cukai seharusnya dapat menempatkan diri di 2 posisi. Bea cukai harus dapat berlaku tidak hanya sebagai pemanen buah, tapi juga sebagai penanam pohon. Karena bila berpandangan sebagai pemanen buah, maka akan muncul fenomena pohon buah yang mati.

Bea cukai juga harus mempunyai paradigma sebagai penanam pohon. Paradigma untuk menumbuhkembangkan pohon yang



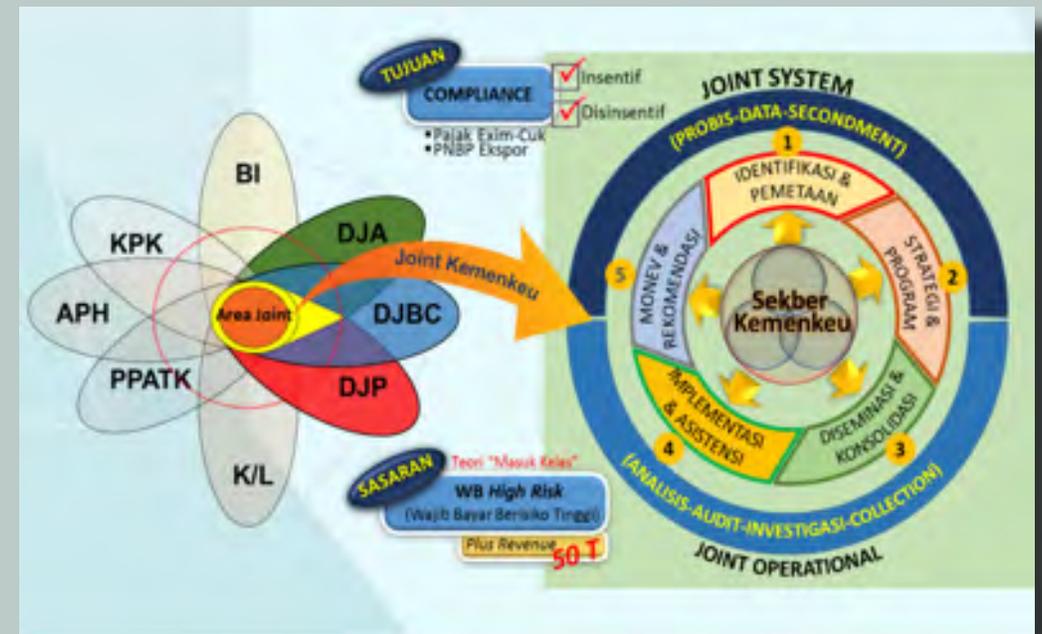
sehat, tidak ada hama, daunnya lebat, akarnya kuat sehingga menyerap air dan mencegah banjir, hingga di-generate sebagai revenue.

Proses menjadi lebih penting dibandingkan produk, meskipun sebagai bagian Kemenkeu, output juga tetap menjadi perhatian. Namun demikian menumbuhkembangkan sebuah pohon itu jauh lebih penting. Terkadang saat menanam pohon, orang tidak lagi memikirkan siapa yang nanti mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Karena menanam pohon bukan semata-mata untuk dirinya, melainkan untuk dapat dinikmati anak cucunya.

Penanam pohon memilih betul jenis bibitnya, merawat dan mengairinya, memberi pupuk, serta menghalau

hama. Hal itu dilakukan agar pohon dapat tumbuh lebat dan berbuah banyak. Sehingga datang investasi, industri dan perdagangan menjadi maju, lapangan kerja tersedia, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Proses tadi tentunya tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga perubahan cara pandang dari sama-sama bekerja menjadi bekerja sama mutlak diperlukan. Bea cukai telah memulai merubah paradigmanya, dari sebagai pemetik buah menjadi penanam pohon. Perubahan itu diharapkan dapat menjawab tantangan Bea cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



### Konsep Joint Program

Cara kerja sendiri-sendiri, dengan mindset 'yang penting kerjaan selesai' sudah tidak bisa diterapkan di era revolusi industri 4.0 ini. Masing-masing pihak harus bisa bersinergi atau 'take and give', peduli satu sama lain. Berangkat dari kerangka inilah 'Joint Program' dibuat. Bea cukai memulai langkah itu dengan penganangan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai (PRKC).

Dalam PRKC, implementasi Joint Program dimulai dengan bersinergi bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sinergi bersama DJP selama 2 tahun terakhir berhasil melewati target yang diamanatkan dengan capaian Rp3 triliun (Rp1,9 triliun) pada

tahun 2017 dan Rp23 triliun (Rp20 triliun) pada tahun 2018. Sedangkan target joint program DJP-DJBC tahun 2019 meningkat menjadi Rp50 triliun.

Mempertimbangkan target yang terus meningkat, Direktur Jenderal Bea Cukai pun melakukan konsultasi bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu. Bea cukai secara simultan juga melakukan sinergi bersama instansi-instansi di luar lingkungan Kemenkeu, seperti program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) yang dideklarasikan pada tanggal 12 Juli 2017. Pada program itu, Bea cukai bersinergi dengan Kejaksaan, TNI-Polri, KPK, hingga PPAK.



Bea cukai sadar bahwa tidak mungkin melakukan penertiban tanpa kerjasama dengan instansi lain, bahkan dengan instansi yang nature businessnya bukan penerimaan. Hal itu dilakukan karena lingkungan strategis yang kondusif sangat penting pada pelaksanaan dan kesuksesan program PIBT tersebut.

Program sinergi atau Joint Program di lingkungan Kemenkeu yang terdiri dari DJP, DJBC, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perlu penyamaan langkah atau harmonisasi. Ketiga instansi tersebut harus mempunyai kesamaan pandangan:

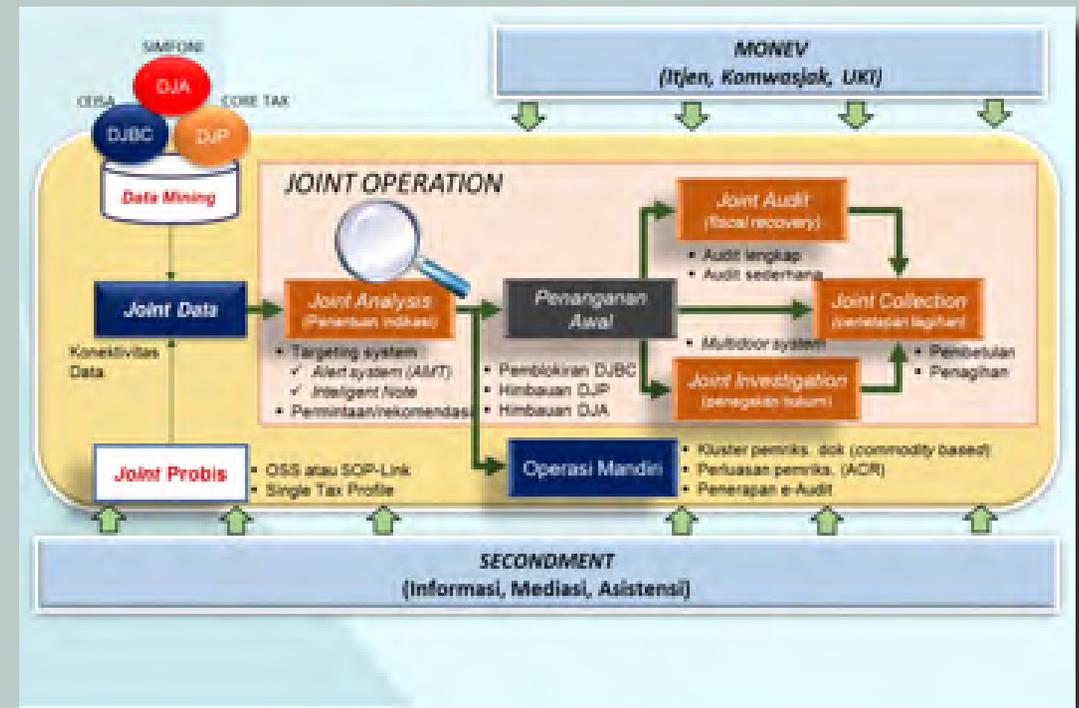
1. Tujuan dari Joint Program adalah kepatuhan atau compliance, bukan melulu pencapaian target.

Pengalaman pelaksanaan Joint

Program DJP-DJBC 2 tahun terakhir, saat pengguna jasa patuh maka target penerimaan akan mengikuti dengan sendirinya. Target compliance adalah bagaimana para wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan, ketentuan keuangan (PNBP), dan kepabeanaan cukai. Bila dianalogikan sebagai siswa, maka Joint Program harus memastikan mereka masuk ke dalam kelas. Dalam proses itu disiapkan 2 skema pelaksanaan. Pertama diberikan insentif setelah patuh. Kedua diberikan hukuman atau disinsentif, kepada yang masih melanggar aturan.

2. Kesamaan sasaran.

Sasaran diistilahkan dengan wajib bayar (WB) high risk.



Dalam konteks kepabeanaan, Bea cukai menyebutnya importir berisiko tinggi (IBT). WB high risk ditargetkan untuk masuk kelas, atau menjadi patuh. Hal dimaksudkan agar tidak ada lagi istilah 'berburu di kebun binatang' atau mengandalkan penerimaan dari obyek relatif patuh atau itu-itu saja. Karena hasilnya tidak besar, namun membuat gaduh karena terkadang dibarengi oleh abuse of power.

Basis dari pelaksanaan Joint Program adalah PIBT yang merupakan bagian dari program PRKC. Dikarenakan Joint Program ini melibatkan instansi DJP dan DJA, maka disesuaikan menjadi Penertiban Wajib Bayar Berisiko Tinggi (PWBBT).

Pencapaian sasaran Joint Program

diimplementasikan dalam bentuk:

1. Joint System yang terdiri dari Joint Proses Bisnis, Joint Data, dan Secondment;
2. Joint Operasional, yang terdiri dari Joint Analisis, Joint Audit, Joint Investigasi, dan Joint Collection.

#### Pelaksanaan Joint Program

Pelaksanaan Joint System dan Joint Operasional, dilakukan dalam tahap-tahap yang berkelanjutan (siklus), meliputi:

1. Identifikasi dan Pemetaan. Harus ada kriteria yang pasti, jangan sampai seperti dokter yang membuat resep tanpa diagnosis. Definisi berisiko tinggi pada program PWBBT

<p>harus mempunyai kriteria yang pasti dan detil, sehingga dapat terbentuk kesamaan persepsi.</p> <p>Contohnya kriteria berisiko tinggi ada pada nilai pabean, tarif, harga dasar, prosedur, atau bahkan personalnya.</p>	<p>Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) diperlukan dalam memonitor pelaksanaan program.</p>	<p>merah. Atau sebaliknya, di satu sisi mendapatkan jalur hijau, namun di sisi lain diseret ke meja hijau.</p>	<p>secara operasional dengan:</p>
<p>2. Strategi dan Program.</p> <p>Contoh pada PIBT, Bea cukai menyusun beberapa inisiatif strategis (IS) yang totalnya mencapai 19 buah. IS tersebut mencakup fungsi penerimaan, pelayanan dan fasilitasi, pengawasan, hingga kultur organisasi.</p>	<p>5. Monitoring Evaluasi dan Rekomendasi.</p> <p>Sebagai sebuah program besar dan relatif terobosan, tentu tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Tahap ini diharapkan dapat menemukan celah tersebut dan menjadikannya sebagai masukan perbaikan di masa depan.</p>	<p>Konektivitas data sebenarnya sudah mulai berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, efektivitas serta output yang dihasilkan belum maksimal. Hal itu disebabkan karena masing-masing instansi belum mempunyai kapasitas untuk mengolahnya. Data perpajakan dari DJP untuk Bea cukai belum tentu dapat diolah maksimal, begitu pula sebaliknya. Bahkan ketidaktahuan pengolahan data bisa mengakibatkan perbedaan persepsi, yang menimbulkan perbedaan perlakuan (jalur merah vs karpet merah).</p>	<p>1. Joint Analysis 2. Joint Audit 3. Joint Collection, dan 4. Joint Investigation</p> <p>Joint Analysis berfungsi menentukan kriteria WB yang merupakan berisiko tinggi atau sebaliknya. Penentuannya tidak menitikberatkan pada entitas, melainkan lebih kepada perilaku terutama yang tidak biasa/normal. Penilaian perilaku tersebut dilakukan dengan membangun alert system yang disebut Automate Monitoring Tool (AMT).</p>
<p>3. Diseminasi dan Konsolidasi.</p> <p>Pemahaman program hingga ke bawah, harus tersampaikan sempurna. Kantor vertikal yang banyak dan tersebar di seluruh nusantara, menjadi tantangan tersendiri. Pemahaman program juga harus memperhatikan keunikan masing-masing daerah atau kearifan lokal.</p>	<p>Ruang lingkup Joint Program telah berkembang, kini meliputi DJP-DJBC-DJA. Ketiga instansi tersebut saat ini sudah mempunyai basis data, seperti Bea cukai dengan Ciesa, DJP dengan Core Tax, dan DJA dengan Simfoni. Pada Joint Program, diharapkan ketiga basis data tersebut akan dapat diharmonisasikan dalam bentuk Joint Data. Harmonisasi atau konektivitas data dilakukan agar Joint Program berjalan efektif.</p>	<p>Menghindari hal itu, maka Joint Proses Bisnis (Probis) harus dilakukan sebelum Joint Data. Diharapkan Joint Probis menghasilkan suatu proses bisnis yang mapan dan baku. Bea cukai saat ini tengah mengembangkan dan mencoba membangun sistem yang dinamakan 'Smart Customs'. Sistem tersebut mengintegrasikan informasi, fungsi, dan kepentingan baik internal maupun eksternal. Alhasil, sebagian proses pada Smart Customs, dapat menjadi bagian pada program Joint Data.</p>	<p>Sistem tersebut bekerja sesuai parameter yang sudah ditentukan, untuk kemudian meneliti dan mengidentifikasi WB. Namun demikian, AMT masih perlu back up dengan pendekatan intelijen oleh unit pengawasan agar lebih optimal. Harapannya, alert system akan mendapat tambahan informasi dari DJP dan DJA, sehingga dapat bekerja maksimal.</p>
<p>4. Implementasi dan Asistensi.</p> <p>Pelaksanaan yang baik ditahap sebelumnya, bisa membuat implementasi program terlaksana sempurna. Peran Itjen dan</p>	<p>Kondisi data yang tidak terhubung satu sama lain, dikhawatirkan mengakibatkan perbedaan perlakuan WB, antara satu instansi dengan yang lain. Jangan sampai WB disediakan karpet merah di satu sisi, namun di sisi lain mendapatkan jalur</p>	<p>Joint Data yang basisnya adalah kesisteman, kemudian dilanjutkan</p>	<p>Informasi dari Joint Analysis selanjutnya akan dilakukan penanganan awal dalam kerangka Joint Program atau secara mandiri. Penanganan awal sendiri adalah</p>

penciptaan prakondisi dalam rangka proses tindak lanjut Joint Analysis, sehingga dapat diselesaikan optimal. Contohnya adalah pemblokiran oleh DJBC terhadap importir, karena terindikasi belum melaporkan SPT meski telah memenuhi kewajiban impor.

Tindakan pada penanganan awal akan memudahkan proses berikutnya. Bila menggunakan pendekatan fiscal recovery, maka dilanjutkan dengan Joint Audit. Opsi Joint Collection, dilaksanakan apabila diputuskan melakukan penagihan. Namun apabila masuk ranah pidana, maka dilakukan penegakan hukum atau enforcement melalui Multidoor Investigation System (MIS) pada Joint Investigation.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Joint Program, maka diperlukan monitoring dan evaluasi

(monev). Peran monev tersebut dilakukan oleh Itjen, Komwasjak, bahkan Unit Pengendalian Internal (UKI). Bea cukai juga mendorong program Secondment di internal Kemenkeu. Program Secondment tersebut dilakukan dengan cara:

1. Sharing informasi;
2. Penempatan sementara (mediasi);
3. Asistensi pemahaman proses bisnis.

DJBC yakin, bahwa Joint Program DJP-DJA-DJBC baru memasuki tahap (sangat) awal dan masih perlu penyempurnaan di beberapa tahapannya. Sehingga kemungkinan penyesuaian masih akan terjadi, terutama setelah mendapatkan masukan dari DJP atau DJA, bahkan unit pengawasan Kemenkeu.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*



## Menuju Bea cukai era 4.0 dengan Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE),

### Bea cukai modern

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau mahfum dikenal dengan Bea cukai, dimata masyarakat selalu identik dengan pelabuhan, bandara, ekspor-impor, narkoba, hingga penyelundupan. Tak ayal cap sebagai pekerja lapangan atau blue collar, meskipun berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melekat pada institusi ini.

Bea cukai memang unit eselon 1 Kemenkeu yang bermahzab semi militer. Seragam berwarna biru dongker lengkap dengan atribut pangkat, serta kewajiban mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) kesamaptaan menambah kesan wibawa (bila tak mau disebut angker).

Banyak yang belum mengetahui bahwa Bea cukai tidak melulu melakukan pengawasan, seperti patroli laut, pengawasan perbatasan, hingga pencegahan penyelundupan. Tugas pengawasan atau community protection hanya merupakan salah satu dari 4 (empat) tugas dan fungsi

Bea cukai, yaitu industrial assistance, trade facilitation, dan revenue collection.

Masyarakat mungkin tidak tahu bahwa ada andil Bea cukai pada peningkatan peringkat ease of doing business (EODB) Indonesia yang kini di posisi 73. Ditambah lagi penyediaan fasilitas yang mendorong produktifitas industri terutama kinerja ekspor nasional. Bahkan mungkin belum banyak yang sadar bahwa Bea cukai berkontribusi hampir 25 persen dari total pendapatan negara di tahun 2018 lalu.

Bea cukai menyadari bahwa organisasinya harus terus berkembang dan berinovasi, bila tak ingin tergerus kemajuan zaman. Bea cukai tidak ingin seperti Blackberry atau Kodak yang pernah berjaya namun sekarang sudah ditinggalkan. Organisasi ini harus segera mengakrabkan diri dan fleksibel bekerja dengan kemajuan teknologi yang merupakan keniscayaan.

Penerapan kemajuan teknologi dalam proses bisnis sudah diterapkan oleh



"Apresiasi setinggi-tingginya kepada para pegawai Bea Cukai yang tetap berada di lokasi pasca bencana gempa di Palu dan Pantoloan, juga kepada para relawan yang berangkat ke Palu".

Sri Mulyani  
Upacara Hari Bea Cukai Ke-72 - 4 Oktober 2018

Bea cukai. Penerapannya tentu bukan hanya dengan mengelektronikkan proses yang sudah ada. Pengembangan sistem informasi juga tidak hanya berorientasi pada efisiensi atas proses bisnis, namun juga harus mampu melihat kebutuhan seluruh stakeholder sebagai konsumen dari multi dimensi. Alhasil, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu menciptakan potensi partisipasi/kolaborasi, kreasi pengembangan bisnis baru, serta berkomunitas.

Konsep Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE) mulai diperkenalkan Bea cukai sebagai jawaban mengantisipasi kemajuan teknologi termasuk era industrialisasi 4.0. ISCE merupakan konsep Big Data berisi informasi ekspor-impor maupun cukai yang terintegrasi.

### Mekanisme ISCE

Konsep ISCE berangkat dari proses collecting data yang dilakukan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW). Data tersebut tentunya didapat dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang informasinya dikelola oleh INSW. Data yang terkumpul selanjutnya diintegrasikan dan diproses lebih lanjut pada platform Big Data.

Disaat yang sama, Big Data mengumpulkan atau menerima data yang berasal dari 8 area, antara lain:

1. Licensing and Investment Management atau Perijinan.
2. Area perijinan ini tidak melulu tentang perijinan perpajakan,



namun juga usaha/bisnis yang dikenal dengan nama online single submission (OSS). Pengelolaannya dibawah Kemenko Perekonomian, INSW, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2. Facilitation Management. Penyediaan informasi dan asistensi dalam rangka menarik investasi melalui program GO-FAST. Informasi dan asistensi yang disediakan berupa fasilitasi berupa insentif fikal maupun prosedural.
3. Clearance Management. Erat kaitannya dengan dwelling time (DT), yang merupakan salah satu unsur penilaian ease of doing business

(EODB). DT merupakan salah satu pertimbangan investor sebelum memutuskan berinvestasi di suatu negara. Bea cukai memaksimalkan peran sistem CEISA-nya dalam pelaksanaannya.

4. Revenue and Treasury Management. Peran aplikasi SPAN dan MPN-G2 dioptimalkan dalam menyediakan informasi berkaitan dengan administrasi fiskal.
5. Protection and Compliance. Informasi pengawasan berguna dalam upaya perlindungan/proteksi, karena dapat memeberikan deteksi dini hingga memelihara kepatuhan pengguna jasa.

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Supply Chain Managemen<br/>Dapat digunakan dalam mempermudah alur logistik, bukan hanya dengan mengurangi DT namun juga logistic cost.</p> <p>7. Communication Management.<br/>Informasi yang komprehensif, bisa digunakan dalam strategi komunikasi publik, baik dengan membangun opini publik maupun menjaga hubungan dengan stakeholder.</p> <p>8. Statistic and Security Support.<br/>Penyediaan informasi untuk kepentingan analisis neraca</p> | <p>perdagangan, bahkan pengawasan atas narkoba hingga terorisme.</p> <p>Kedelapan area atau fungsi di atas, kemudian membentuk informasi bisnis dan ekspor-impor yang terintegrasi pada suatu Big Data. Informasi yang terdapat dalam Big Data kemudian diproses secara modern, dianalisis, dan filterisasi sehingga menghasilkan output berupa Smart Information.</p> <p>Smart Information inilah yang merupakan produk unggulan program ISCE. Melalui Smart Information, Bea</p> |
|--|--|

cukai mencoba membuat irisan dari seluruh proses bisnis baik internal maupun eksternal Kemenkeu. Program ISCE merupakan turunan dari program nasional Indonesia Single Risk Management (ISRM), sehingga menjadikan cakupannya juga meliputi eksternal Kemenkeu.

**Smart Information**

Disebut Smart Information karena memang informasi yang dihasilkan berupa profil sekaligus risiko. Informasi berupa profil dan risiko, dapat digunakan kembali oleh ke-8 area yang sebelumnya memberikan

informasi ke Big Data. Alhasil proses collecting data 2 arah terjadi, sehingga dapat meng-update informasi pada Big Data.

Smart Information akan disediakan dalam 3 kategori menurut bentuknya:

1. Informasi Umum, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Informasi Terbatas, sesuai kebutuhan atau domain pengguna informasi.
3. Informasi Komplit, yang hanya dapat digunakan oleh pengguna informasi tertentu.

Smart Information berdasarkan sifatnya, juga akan memberikan informasi yang tidak melulu reporting. Informasi yang diberikan bisa berupa profiling, detecting, monitoring hingga forecasting. Penyediaan informasi yang komprehensif ini sesuai dengan tuntutan era revolusi industri 4.0, dimana teknologi informasi sudah mencapai level virtual robbing.

Kegunaan ISCE dalam mengintegrasikan proses bisnis, menjadikannya tidak hanya mempunyai makna harfiah, yaitu cerdas. Akan tetapi juga memberikan makna berupa parameter, yaitu:

- S = Secure
- M = Measurable
- A = Automated
- R = Risk Management Based
- T = Technology Driven



## PENERIMAAN PAJAK

Satu juta lebih Wajib Pajak yang tahun lalu lapor SPT secara manual, tahun ini melapor secara elektronik

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi  
Penerimaan  
Pajak s.d. Maret  
2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi s.d. Maret 2019		
			Δ% 2018 - 2019	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	157,29	9,02 %	17,59 %
- Migas	66,15	14,48	26,46 %	21,88 %
- Non Migas	828,29	142,81	7,52 %	17,24 %
PPN & PPnBM	655,39	89,94	-8,88 %	13,72 %
PBB & Pajak Lainnya	27,71	1,75	12,74 %	6,31 %
<b>Jumlah</b>	<b>1.577,56</b>	<b>248,98</b>	<b>1,82 %</b>	<b>15,78 %</b>

\*angka sementara per Maret 2019

Sampai dengan bulan Maret 2019, penerimaan pajak yang terhimpun di Kas Negara telah mencapai Rp248,98 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 1,82 persen (yoy). Realisasi tersebut juga setara dengan 15,78 persen dari target APBN 2019.

Kinerja penerimaan pajak ditopang oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai Rp142,81 triliun, tumbuh 7,52 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apabila kita lihat lebih dalam, pertumbuhan PPh Nonmigas didorong oleh kinerja yang baik dari jenis pajak PPh Pasal 25/29. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan

Pertumbuhan  
(y-o-y) 1 Jan s.d,  
31 Mar 2019

Jenis Pajak	growth (yoy)	
	Jan-Mar 2018	Jan-Mar 2019
PPh Pasal 25		
- Badan	40,21	15,38 %
- Orang Pribadi	6,50	21,37 %
PPh Pasal 21	35,10	15,48 %
PPh Pasal 22	3,83	13,24 %
PPh Final	26,40	0,16 %
PPN Dalam Negeri	47,00	-15,05 %
Pajak atas Impor		
- PPh 22 Impor	13,45	2,79 %
- PPN Impor	40,54	-0,46 %
- PPnBM Impor	0,82	-13,80 %

tumbuh 15,38 persen (yoy). Sedangkan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tumbuh 21,37 persen (yoy), seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PPh Pasal 21 tumbuh 15,48 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan tetap sehatnya pasar tenaga kerja, baik dari sisi jumlah tenaga kerja yang dipotong PPh Pasal 21 maupun upah / gaji sebagai basis pemotongan. PPh Final tumbuh melambat 0,16 persen (yoy), salah satunya diakibatkan restitusi dari

tiga Wajib Pajak besar di sektor Migas.

PPN Dalam Negeri mengalami perlambatan disebabkan oleh peningkatan restitusi akibat adanya fasilitas pemberian kelonggaran restitusi dipercepat yang berlaku sejak bulan April 2018. Penerimaan bruto PPN Dalam Negeri sampai dengan Maret 2019 sebenarnya masih tumbuh positif 4,70 persen (yoy), relatif setara bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 4,84 persen (yoy).

Ditinjau dari sisi sektoral, kinerja penerimaan pajak ditopang oleh pertumbuhan sektor Perdagangan (tumbuh 1,32 persen (yoy)), Jasa Keuangan (tumbuh 11,30 persen (yoy)), Konstruksi & Real Estat (tumbuh 6,10 persen (yoy)) dan Transportasi & Pergudangan (tumbuh 24,00 persen (yoy)). Khusus untuk sektor perdagangan perlambatan penerimaan lebih disebabkan oleh besarnya restitusi pada triwulan I 2019. Peningkatan restitusi juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan yang mengakibatkan penurunan penerimaan sebesar 8,81 persen (yoy), namun pada dasarnya penerimaan bruto sektor Industri Pengolahan masih tumbuh positif 5,08 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan Indeks manufaktur PMI yang menguat ke level 51,2 setelah sebelumnya berada di level 50,1 pada bulan Februari 2019 dan 49,9 di bulan Januari. Demikian pula dengan sektor Pertambangan yang mengalami penurunan 16,23 persen (yoy), namun penerimaan bruto masih tumbuh positif 4,52 persen, di tengah tekanan dari penguatan nilai tukar rupiah dan normalisasi harga komoditas pertambangan seperti batubara dan tembaga.

#### SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Transformasi Digital jadi Pendorong Penerimaan

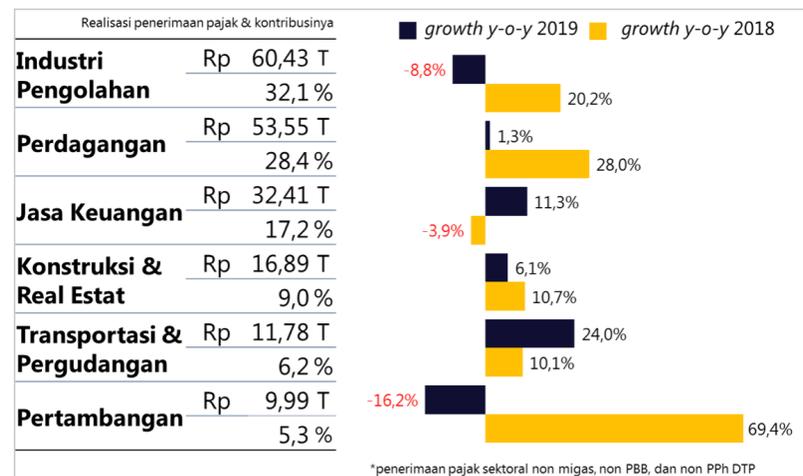
Di tengah rutinitas masyarakat modern, terkadang kita tidak terlalu menyadari pergantian hari dan bulan. Tetapi kita bisa tahu bahwa kita sedang berada di penghujung bulan Maret dimana tanggal 31 Maret adalah batas waktu penyampaian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (tahun ini diperpanjang hingga 1 April karena 31 Maret jatuh pada hari libur). SPT Tahunan merupakan indikator penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment*.

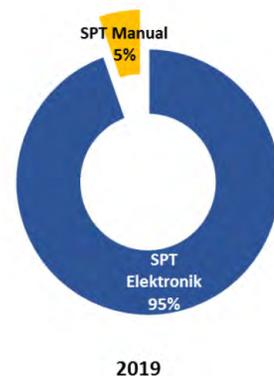
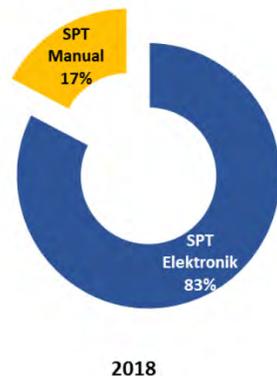
Seiring dengan kemudahan penyampaian SPT dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, tahun ini atmosfernya terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antrian penulisan SPT Manual (dalam bentuk kertas) berkurang drastis, digantikan dengan pandangan para Wajib Pajak sedang berkonsultasi seputar SPT elektronik, atau sekadar mengajukan permintaan *e-FIN* dan *reset password* akun DJP-Online.

Seiring semakin tingginya penetrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat kita, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan layanan perpajakan berbasis elektronik sekaligus mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkannya. Upaya itu ternyata cukup efektif. DJP telah berhasil membuat Wajib Pajak beralih dari metode penyampaian SPT Manual (kertas) menuju penyampaian **SPT Elektronik seperti e-filing, e-SPT, dan e-form**. Pada tahun 2018 lalu 17 persen dari total SPT Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan SPT Manual. Kini hanya 5 persen saja SPT yang disampaikan secara manual. Sebaliknya, porsi penyampaian SPT Elektronik naik dari 83 persen menjadi 95 persen. Tercatat terdapat satu juta Wajib Pajak yang tahun lalu lapor SPT secara manual yang tahun ini lapor secara elektronik.

Pertumbuhan  
(y-o-y) 1 Jan s.d,  
31 Mar 2019



Metode  
Penyampaian  
SPT Tahunan  
PPH OP

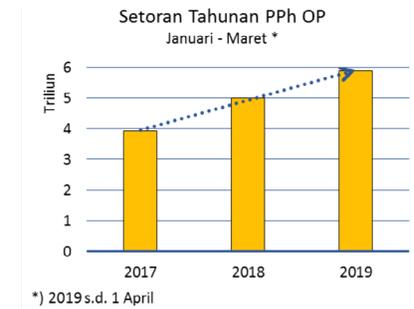


Pemanfaatan teknologi pun tidak berhenti sampai di situ. DJP telah mengirimkan jutaan *e-mail* mengingatkan Wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan lebih awal, tidak mendekati tanggal jatuh tempo, sesuai *tagline* tahun ini “Lebih Awal, Lebih Nyaman”. Isi *e-mail* yang dikirimkan pun bukan sekadar *e-mail* biasa, namun setelah melalui riset dengan menerapkan pendekatan perilaku Wajib Pajak (*behavioural insights*). Tidak sia-sia, hasilnya ternyata cukup menggembirakan.

Di tahun 2019 ini terjadi perubahan perilaku Wajib Pajak, dimana pada tahun-tahun sebelumnya pelaporan terkonsentrasi di akhir. Setelah

pengiriman *e-mail blast* pada tanggal 1 – 5 Maret, Wajib Pajak ternyata terdorong untuk lapor lebih awal, menggeser sebagian beban puncak penyampaian SPT Tahunan ke sebelum tanggal 16 Maret sesuai isi himbauan dalam *e-mail*, dan mengurangi jumlah pelapor “*last minute*” di akhir periode pelaporan.

Membaiknya kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan diiringi baiknya kinerja penerimaan setoran PPh Tahunan Orang Pribadi (Pasal 29). Setoran Pasal 29 tahun ini meningkat, dari Rp.5,00 triliun di tahun 2018 menjadi Rp.5,89 triliun, atau tumbuh *double digits* 17,87 persen (*yoy*). Baiknya kinerja setoran Pasal 29 juga



menjadi salah satu indikator positif untuk penerimaan setoran angsuran bulanan PPh Orang Pribadi (Pasal 25) satu tahun ke depan.

Selain dalam bentuk setoran Pasal 29 dan Pasal 25, sebagian lain Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjalankan kewajiban perpajakannya dalam bentuk PPh Final (setoran PP 23/2018). Apabila kita lihat kinerja setoran tersebut untuk periode Januari – Maret 2019, terdapat penurunan 22,75 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Namun perlu diingat penurunan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan penurunan tarif PPh

Final UMKM sebesar 50 persen dari 1 persen menjadi hanya 0,5 persen.

Kinerja baik yang ditunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun ini pada prinsipnya sejalan dengan terus tumbuhnya sektor perdagangan eceran, dimana Wajib Pajak UMKM umumnya berusaha. Berdasarkan Survey Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia, penjualan eceran tumbuh meningkat pada bulan Februari yang didukung oleh terjaganya stabilitas harga. Indeks Penjualan Riil Februari 2019 sebesar 218,2 atau tumbuh 9,1 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan Januari sebesar 7,2 persen (*yoy*), dan diperkirakan tetap tumbuh positif di bulan Maret sebesar 8,0 persen (*yoy*).

## KEPABEANAN DAN CUKAI

No.	JENIS PENERIMAAN	APBN 2019	Realisasi s.d Mar		Growth (y-o-y)		% Capaian
			2018	2019	% 2018	% 2019	
1	BEA MASUK	38.90	8.41	8.54	9.59	1.56	21.96
2	CUKAI	165.50	8.05	21.35	16.27	165.11	12.90
3	BEA KELUAR	4.42	1.43	1.08	70.37	-24.76	24.34
<b>TOTAL</b>		<b>208.82</b>	<b>17.90</b>	<b>30.97</b>	<b>15.89</b>	<b>73.04</b>	<b>14.83</b>
PPN Impor			40.72	40.54	21.55	-0.46	
PPn BM Impor			0.96	0.82	-4.46	-13.80	
PPH Pasal 22 Impor			13.09	13.45	25.09	2.79	
Total PDRI lainnya			54.77	54.82	21.80	0.08	
<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>			<b>72.67</b>	<b>85.78</b>	<b>20.29</b>	<b>18.05</b>	

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Maret 2019 telah mencapai Rp30,97 triliun atau 14,83 persen dari target APBN tahun 2019. Capaian tersebut lebih baik dari capaian pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp17,90 triliun atau tumbuh 74,68 persen. Capaian penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk periode yang sama, masih tumbuh positif meskipun hanya 0,08 persen atau sebesar Rp54,82 triliun. Sehingga

total penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Maret 2019 adalah Rp85,78 triliun.

Pertumbuhan penerimaan yang signifikan tersebut didorong oleh penerimaan cukai, yang pertumbuhannya mencapai 165,11 persen atau sebesar Rp21,35 triliun. Kinerja penerimaan cukai, kontributor terbesarnya berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) yang tumbuh hingga 189,14 persen. Faktor tidak

Pertumbuhan Penerimaan CHT PERIODE sd MARET  
(Dalam 3 Tahun Terakhir)



adanya kenaikan tarif di tahun 2019, berdampak pada meningkatnya pemesanan pita cukai (CK1) di awal tahun. Alhasil, pelunasan CK1 yang jatuh tempo dibulan Maret 2019 berdampak positif pada penerimaan CHT.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA) juga meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu tumbuh 13,26 persen. Peningkatan kinerja tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan MMEA per 31 Maret 2019 sudah mencapai Rp1,18 triliun atau 19,73 persen dari target APBN tahun 2019. Efek penertiban cukai beriko tinggi (PCBT) dalam memberantas peredaran MMEA ilegal, mengakibatkan MMEA legal mengisi pasar. Hal tersebut mendorong tumbuhnya produksi MMEA legal, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan cukai MMEA. Sedangkan penerimaan cukai etil alkohol (EA) memberi kontribusi sebesar Rp0,03 triliun.

Penerimaan bea masuk (BM) sampai dengan akhir bulan Maret 2019 sudah

mencapai Rp8,54 triliun. Kegiatan importasi nasional yang merupakan faktor fundamental penerimaan BM, kinerjanya mulai menurun sejak awal tahun 2019. Namun demikian, capaian penerimaan BM masih sanggup tumbuh meskipun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,56 persen. Program penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) yang terus diperkuat, menjadi *extra effort* DJBC dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa yang pada akhirnya mendorong penerimaan BM.

Penerimaan bea keluar (BK) per 31 Maret 2019 mencapai Rp1,08 triliun. Turunnya kinerja ekspor nasional terutama ekspor tembaga, dan belum membaiknya harga komoditas primadona ekspor terkena BK, memberikan tekanan pada capaian penerimaan BK. Namun demikian, realisasi penerimaan BK telah mencapai 24,34 persen dari target penerimaan BK pada APBN 2019. Capaian BK terhadap targetnya tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan capaian atas target pada komponen penerimaan yang lain.

## PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBPs.d. 31 Maret 2019 (dalam miliar Rupiah)	2019	Realisasi		
	APBN	31 Maret 2019	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	70.044,18	18,52	(1,47)
A. Penerimaan SDA	190.754,77	34.896,89	18,29	(3,03)
1. Migas	159.778,31	26.662,65	16,69	(4,35)
a. Minyak Bumi	118.606,71	26.646,25	6,69	(4,41)
b. Gas Alam	41.171,60	16,40	22,47	-
2. Non Migas	30.976,46	8.234,24	0,04	1,48
a. Pertambangan Minerba	24.960,72	7.049,55	28,24	0,83
b. Kehutanan	4.511,54	823,41	18,25	7,92
c. Perikanan	625,81	167,73	26,80	20,41
d. Pend. Per. Panas Bumi	878,38	193,55	22,03	(12,21)
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	2,64	0,01	(91,50)
C. PNBPs Lainnya	94.069,33	25.765,45	27,39	3,36
D. Pendapatan BLU	47.884,45	9.379,20	19,59	(7,55)

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, realisasi PNBPs mencapai Rp70,04 triliun atau 18,52 persen dari APBN tahun 2019. Realisasi PNBPs bulan Maret 2019 mencapai Rp30,13 triliun, di atas realisasi Januari (Rp18,71 triliun) dan Februari (Rp21,20 triliun).

Realisasitersebut lebih rendah 1,40 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018,

yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan capaian penerimaan SDA Migas. Penurunan penerimaan SDA Migas tersebut diantaranya disebabkan lebih rendahnya realisasi ICP periode bulan Januari-Maret 2019 sebesar USD 60,49 per barel, dibandingkan ICP bulan Januari – Maret 2018 sebesar USD 63,02 per barel. Turunnya realisasi ICP periode bulan Januari-Maret 2019

menyebabkan realisasi penerimaan SDA Migas sampai dengan Maret 2019 yang mencapai Rp26,66 triliun atau 16,69 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2019 turun 4,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp27,87 triliun.

Sementara itu, realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp8,23 triliun atau 26,58 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp8,11 triliun. Meskipun realisasi Harga Batubara Acuan (HBA) Januari-Maret sebesar USD91,59/ton lebih rendah dari tahun sebelumnya (USD99,36/ton), penerimaan SDA Non Migas lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi telah terintegrasikannya aplikasi E-PNBPs (aplikasi online berbasis web yang menghitung secara akurat nilai kewajiban perusahaan dalam melunasi PNBPs Minerba) dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNBPs Online), sehingga dapat

dilakukan verifikasi yang lebih akurat.

Dari sektor Kekayaan Negara Dipisahkan, realisasi baru mencapai Rp2,64 miliar. Jumlah ini akan bertambah ke depan mengingat BUMN baru akan menyelenggarakan RUPS pada awal bulan Mei, sehingga realisasi penerimaan, khususnya dari pendapatan deviden baru akan tercatat secara signifikan mulai bulan Juni 2019.

Untuk realisasi penerimaan PNBPs Lainnya telah mencapai Rp25,76 triliun atau 27,39 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,59 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp24,87 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan BLU, hingga 31 Maret 2019 terealisasi sebesar Rp9,38 triliun atau mencapai 19,59 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,54 persen (yoy) dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp10,14 triliun.

## BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Maret 2019 ditopang dengan meningkatnya penyerapan belanja KL.

**R**ealisasi BPP sampai dengan 31 Maret 2019 telah mencapai Rp260,74 triliun atau sekitar 15,95 persen dari pagu APBN tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi BPP

mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,45 persen (yoy). Kinerja penyerapan BPP tersebut ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja K/L dari 12,17 persen terhadap pagu

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d Maret 2019

	2019 APBN	Realisasi		
		s.d. 31 Maret 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>855,45</b>	<b>128,76</b>	<b>15,05</b>	<b>24,84</b>
Belanja Pegawai	128,76	45,06	20,08	11,57
Belanja Barang	15,05	37,68	10,93	7,17
Belanja Modal	24,84	9,05	4,78	(6,73)
Bantuan Sosial	<b>224,41</b>	36,97	38,09	106,62
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>45,06</b>	<b>131,98</b>	<b>16,94</b>	<b>0,89</b>
al. Pembayaran Bunga Utang	20,08	70,58	25,58	3,08
Subsidi	11,57	21,83	9,73	(13,70)
<b>Jumlah</b>	<b>1.634,34</b>	<b>260,74</b>	<b>15,95</b>	<b>11,45</b>

APBN tahun 2018 menjadi 15,05 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Sedangkan realisasi belanja NonK/L menurun dari 21,55 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 16,94 persen terhadap pagu APBN tahun 2019.

Kinerja BPP dapat dilihat dari pertumbuhan yang relatif cukup tinggi pada belanja pegawai (11,57 persen (yoy)), belanja barang (7,17 persen (yoy)), belanja sosial (106,62 persen (yoy)) diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan konsumsi, baik itu rumah tangga maupun pemerintah pada Triwulan I 2019 yang lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2018.

Dari sisi jenis belanja, peningkatan kinerja realisasi BPP yang terbesar adalah pada belanja bantuan sosial. Hal ini merupakan sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok, realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 31 Maret 2019 telah mencapai 38,09 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,16 persen dari pagu APBN tahun 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi tingginya realisasi tersebut disebabkan oleh: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai dengan tahap ke II dengan peningkatan indeks pada komponen kesehatan dan pendidikan sebesar 100 persen, (ii) percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah dibayar sampai dengan bulan Mei 2019, (iii) realisasi Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT), dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Maret 2018 mengalami peningkatan namun kurang signifikan, yaitu dari 10,38 persen terhadap APBN tahun 2018 menjadi 10,93 persen terhadap APBN tahun 2019. Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar adalah belanja barang yang digunakan untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang kepada siswa-siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selain itu, proporsi terbesar berikutnya adalah realisasi belanja barang dalam rangka kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pemilu 2019, antara lain untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta persiapan penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu pada April 2019, yang dilaksanakan oleh Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi Pemilihan Umum.

Kinerja realisasi belanja modal sampai dengan Maret 2019 lebih baik dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan menurun yang terjadi pada belanja modal hingga akhir Maret 2019 sebesar 6,73 persen (yoy) masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar 17,65 persen. Terjadinya penurunan belanja modal pada

Triwulan I 2019 tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan impor yang berdampak terhadap penurunan PPN impor, meskipun di sisi lain PPh impor mengalami peningkatan pada bulan Maret 2019.

Proporsi penyerapan belanja modal terbesar adalah belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, antara lain dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, prasarana perkeretaapian, pembangunan jalan dan bendungan, yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pertanian. Selain itu, proporsi terbesar berikutnya adalah realisasi belanja modal peralatan dan mesin dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, dan BPS. Belanja modal yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif.

#### **A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019**

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp128,76 triliun atau 15,05 persen terhadap pagu APBN 2019. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 12,92 persen. Rata-rata tingginya realisasi belanja K/L tersebut masih didominasi oleh 15 K/L terbesar, utamanya Kementerian Sosial yang

telah merealisasikan Belanja Sosial dengan percepatan pencairan PKH dan Kementerian Kesehatan yang telah melakukan percepatan pencairan PBI di muka untuk periode sampai dengan bulan Mei 2019. Selain itu, beberapa faktor yang ikut memengaruhi kinerja penyerapan belanja K/L, antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, dan percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, bidikmisi, dan PBI untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Disamping melaksanakan kegiatan produktif melalui peningkatan belanja modal, pemerintah juga meningkatkan belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan.

Sampai dengan akhir Maret 2019, K/L yang telah melakukan kontrak telah mencapai Rp90,04 triliun atau 47,56 persen dari belanja modal K/L. Tiga K/L yang telah melakukan kontrak dengan nilai terbesar adalah Kemen PU PERA, Kemenhan, dan Kemenhub.

#### **B. REALISASI BELANJA NONK/L TAHUN 2019**

Realisasi belanja nonK/L sampai dengan 31 Maret 2019 mencapai Rp131,98 triliun lebih tinggi secara nominal dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp130,82 triliun. Dalam realisasi belanja NonK/L terdapat penurunan realisasi belanja pembayaran bunga utang dan belanja subsidi.

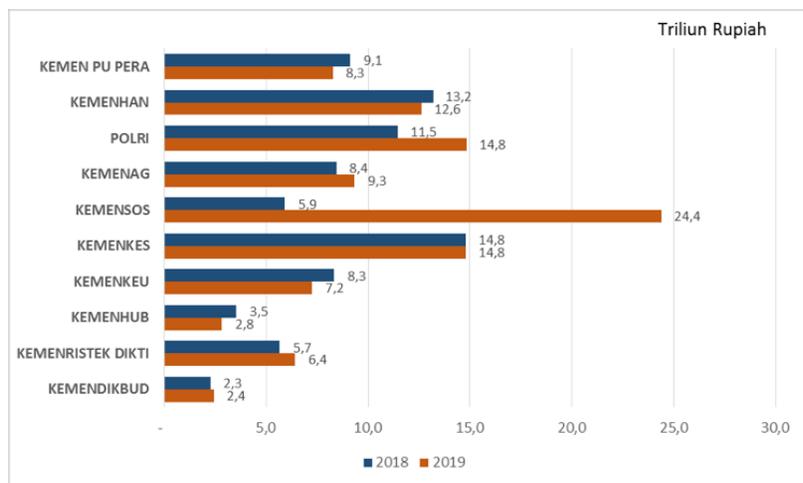
Realisasi **pembayaran bunga utang**

sampai dengan 31 Maret 2019 sebesar 25,58 persen terhadap APBN tahun 2019 lebih rendah secara persentase bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 28,69 persen terhadap APBN 2018. Penurunan tersebut terutama karena kondisi *yield* Surat Berharga Negara (SBN) yang stabil dan cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan dengan tren meningkat di awal 2018. Selain itu, terdapat perubahan komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal

pembayaran kupon SBN seri *benchmark* yang menyebabkan pola pembayaran bunga bulanan bersifat dinamis.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp21,83 triliun atau 9,73 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi belanja subsidi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun sebelumnya yang mencapai Rp25,29 triliun atau 16,19 persen terhadap APBN tahun 2018. Dalam APBN tahun 2019, pagu

Tabel Perkembangan Penyerapan Belanja K/L



Tabel Realisasi Belanja non-K/L s.d Maret 2019

Belanja NonK/L	2019		% thd APBN	% Growth APBN
	APBN	s.d 31 Mar		
al. 1. Belanja Pegawai	157,15	39,01	24,82	6,42
2. Belanja Barang	0,59	0,01	0,96	-
3. Pembayaran Bunga Utang	275,89	70,58	25,58	3,08
4. Subsidi	224,32	21,83	9,73	(13,70)
5. Belanja Hibah	1,94	0,00	0,14	-
<b>JUMLAH</b>	<b>778,89</b>	<b>131,98</b>	<b>16,94</b>	<b>0,89</b>

subsidi meningkat dari Rp156,23 triliun pada APBN tahun 2018 menjadi Rp224,32 triliun pada APBN tahun 2019. Peningkatan pagu subsidi tersebut disebabkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, terutama nilai tukar dan ICP, serta perubahan subsidi tetap solar menjadi Rp2.000/liter. Sebagian besar realisasi subsidi tersebut merupakan pencairan belanja subsidi energi, yaitu subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik. Adapun subsidi non energi yang belum

terdapat realisasinya sampai Maret 2019 disebabkan adanya proses administrasi dan verifikasi di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai syarat pengajuan pencairan tagihan subsidi.

## Tiga Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



Disalurkan paling cepat pada bulan



Mulai tahun 2019, salah satu persyaratan penyaluran DAK Fisik adalah laporan penyerapan dan capaian output DAK Fisik yang telah direview oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)



Belanja Negara

## TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Realisasi TKDD masih sesuai target, bukti Pemerintah dalam mendukung peningkatan layanan publik di daerah

**T**ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai salah satu sarana pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia memiliki alokasi sebesar Rp826,77 triliun dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2019. Dari jumlah tersebut, 23,14 persen diantaranya atau sekitar Rp191,32 triliun telah terealisasi per 31 Maret 2019.

### DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan memiliki porsi terbesar dalam struktur TKDD, yakni sebesar Rp724,59 triliun atau 87,64 persen dari total alokasi TKDD dalam APBN TA 2019. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) yang penggunaannya relatif fleksibel sesuai kebutuhan dan prioritas daerah dan Dana Transfer Khusus (DTK)

yang sifatnya lebih diarahkan sesuai prioritas pembangunan nasional.

### DANA TRANSFER UMUM (DTU)

DTU, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah. Hingga akhir triwulan I tahun 2019, realisasi DTU berjumlah Rp158,42 triliun, atau 30,22 persen dari pagu anggaran DTU sebesar Rp524,22 triliun.

### Dana Alokasi Umum (DAU)

Di TA 2019, Alokasi DAU sebesar Rp417,87 triliun merupakan gabungan dari DAU reguler sebesar Rp414,87 triliun dan DAU tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp3,00 triliun.

Sampai dengan 31 Maret 2019, realisasi penyaluran DAU reguler telah mencapai Rp138,27 triliun atau 33,33 persen, lebih tinggi baik secara nominal maupun persentase bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp133,26 triliun atau 33,19 persen (TA 2018 hanya ada DAU reguler). Angka tersebut telah memperhitungkan: (i) penyelesaian kewajiban Daerah Otonom Baru (DOB) pada 2 daerah sebesar Rp4 miliar dan (ii) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh 7 daerah sebesar Rp31,04 miliar. Selain itu, terdapat penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 21 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) sebesar Rp89,82 miliar.

Di sisi lain, realisasi penyaluran DAU tambahan sampai dengan 31 Maret 2019 telah disalurkan kepada 49 Pemerintah Daerah sebesar Rp151,45 miliar atau 5,05 persen dari pagu alokasi.

#### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Realisasi penyaluran DBH hingga 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp20,00 triliun atau 18,81 persen dari pagu alokasi sebesar Rp106,35 triliun, meningkat Rp3,08 triliun jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp16,92 triliun atau 18,97 persen dari pagu alokasi sebesar Rp89,22 triliun. Capaian tersebut secara berturut-turut disumbangkan

oleh realisasi penyaluran DBH Sumber Daya Alam Rp10,57 triliun, DBH Pajak Rp8,65 triliun, dan DBH Cukai Hasil Tembakau Rp0,78 triliun.

#### **DANA TRANSFER KHUSUS (DTK)**

Melalui kebijakan DTK, Pemerintah Pusat berupaya mempengaruhi pola belanja daerah untuk mengurangi kesenjangan layanan antardaerah melalui *earmarking* (pengarahan/ penentuan) penggunaan DTK. Sampai dengan 31 Maret 2019, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp17,63 triliun atau 8,80 persen dari pagu alokasi.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

DAK Fisik TA 2019 terdiri dari 3 Jenis dan 14 Bidang dengan pagu anggaran sebesar Rp69,33 triliun. Alokasi tersebut naik sebesar 11,03 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp62,43 triliun. Kenaikan anggaran tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur di daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) kepada masyarakat.

Hingga akhir bulan Maret 2019, belum ada penyaluran DAK Fisik ke daerah karena Pemerintah Daerah masih dalam proses penyelesaian pengadaan/lelang, sehingga belum dapat menyampaikan syarat daftar kontrak kegiatan untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I. Selanjutnya, untuk pelaksanaan DAK Fisik TA 2019, terdapat bidang-bidang yang akan

disalurkan secara sekaligus dengan pagu di atas Rp1,00 miliar sesuai rekomendasi Kementerian Teknis, yaitu bidang pasar untuk menu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, bidang kesehatan pada subbidang kesehatan rujukan untuk menu pengadaan alat kesehatan dan prasarana rumah sakit, dan bidang transportasi untuk menu pengadaan moda transportasi darat.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik**

Hingga akhir triwulan I tahun 2019, penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp17,63 triliun atau 13,45 persen dari pagu alokasi dalam APBN TA 2019. Capaian tersebut dipengaruhi oleh tingkat pelaporan daerah dan sisa dana tahun 2018 yang diperhitungkan pada penyaluran triwulan I/semester I tahun 2019. Realisasi penyaluran DAK Nonfisik per 31 Maret 2019 juga dipengaruhi oleh adanya jenis DAK Nonfisik baru yang direncanakan disalurkan pada bulan April 2019 yakni Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah.

Untuk meningkatkan capaian realisasi penyaluran telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait untuk melakukan upaya bersama mendorong penyerapan di daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan kegiatan/upaya lainnya.

#### **DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

Realisasi penyaluran DID sampai dengan 31 Maret 2019 berjumlah Rp5,00 triliun atau 50,04 persen dari pagu alokasinya. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari segi jumlah maupun persentase penyaluran dibandingkan triwulan I tahun 2018, dimana realisasinya saat itu hanya sebesar Rp2,70 triliun atau 31,81 persen dari pagu. Capaian tersebut merupakan realisasi penyaluran DID tahap I kepada 325 Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran tahap I berupa: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2019; (ii) Rencana penggunaan DID TA 2019; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID TA 2018 bagi daerah yang menerima DID TA 2018.

#### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Hingga akhir Maret 2019, belum terdapat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disebabkan ketiga provinsi penerima Dana Otsus belum menyampaikan dan melengkapi persyaratan Penyaluran Dana Otsus Tahap I sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019  
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Maret 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	% thd APBNP	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>766.162,58</b>	<b>185.598,11</b>	<b>24,22</b>	<b>826.772,53</b>	<b>191.325,24</b>	<b>23,14</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>706.162,58</b>	<b>175.313,73</b>	<b>24,83</b>	<b>756.772,53</b>	<b>181.237,86</b>	<b>23,95</b>
A. Dana Perimbangan	676.602,99	170.053,85	25,13	724.592,59	176.053,48	24,30
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	150.185,57	30,61	524.223,75	158.425,46	30,22
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	16.923,90	18,97	106.350,16	20.004,38	18,81
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	133.261,68	33,19	417.873,58	138.421,08	33,13
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	19.868,28	10,69	200.368,84	17.628,01	8,80
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	17,78	0,03	69.326,70	-	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	19.850,50	16,08	131.042,14	17.628,01	13,45
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	2.703,63	31,81	10.000,00	5.004,39	50,04
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	2.556,26	12,14	22.179,94	180,00	0,81
1. Dana Otsus	20.059,58	2.406,26	12,00	20.979,94	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	1.686,26	21,00	8.357,47	-	-
b. Provinsi Aceh	8.029,79	-	-	8.357,47	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	720,00	18,00	4.265,00	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	150,00	15,00	1.200,00	180,00	15,00
<b>Dana Desa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.284,38</b>	<b>17,14</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.087,37</b>	<b>14,41</b>

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



## PEMBIAYAAN UTANG

Kenaikan Alokasi SBSN Proyek Guna Mendukung  
Pembangunan Infrastruktur

Secara umum, hingga akhir Maret 2019 pembiayaan melalui utang telah mencapai hampir setengah dari target APBN 2019. Capaian ini tidak terlepas dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp185,8 triliun atau 47,78 persen dari target yang ditetapkan dan pinjaman luar negeri yang telah terealisasi sebesar Rp7,97 triliun atau 26,41 persen dari target APBN 2019. Sementara itu, di sisi pinjaman dalam negeri masih belum terdapat transaksi hingga akhir Maret 2019.

Sebagaimana halnya kondisi bulan Februari 2019, realisasi SBN pada bulan Maret 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan penerbitan pada periode yang sama tahun 2018. Kondisi pasar yang semakin kondusif terhadap SBN serta semakin tertariknya masyarakat dalam negeri serta asing untuk berinvestasi ke dalam SBN merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya realisasi SBN pada bulan Maret 2019. Disamping itu, strategi frontloading

juga menjadi salah satu faktor yang mendukung relatif besarnya realisasi SBN pada bulan Maret ini. Namun demikian, Pemerintah menjalankan strategi frontloading secara proporsional sehingga tidak mengganggu rencana penerbitan SBN pada bulan-bulan berikutnya. Dalam menentukan besaran utang yang diterbitkan atau dibuat Pemerintah untuk tahun berjalan, sebelumnya harus sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

Salah satu makna dari semakin besarnya peran serta dan minat masyarakat dalam negeri untuk berinvestasi di SBN adalah semakin terlihat nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan program financial inclusion dan financial literacy. Program financial inclusion dan financial literacy merupakan program yang amat penting untuk disebarkan kepada masyarakat agar semakin disadarkan akan pentingnya pengelolaan

## Pembiayaan Utang

*(dalam Miliar Rupiah)*

	2019		
	APBN	s.d. 31 Maret	% APBN
Pembiayaan Utang	359.250,6	177.860,0	49,51%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	185.833,0	47,78%
2. Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	(7.972,9)	-26,84%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,4	0,0	0,00%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	0,0	0,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.473,9)	0,0	0,00%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	(7.972,9)	-26,41%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	8.480,3	14,07%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(90.470,2)	(16.453,2)	18,19%

keuangan melalui investasi dalam mewujudkan kesejahteraan selain untuk mengelola dana 'idle' yang ada pada masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan produktif.

Disamping masyarakat dalam negeri yang mendorong tingginya realisasi SBN pada Triwulan I 2019, faktor investor asing yang semakin agresif untuk memiliki SBN juga menjadi pendukung, mengingat Obligasi Negara Indonesia didukung oleh kinerja fiskal yang baik dan APBN yang kredibel, serta kondisi perekonomian Indonesia yang sehat sehingga potensi gagal bayar pemerintah amat kecil.

Patut juga dicatat bahwa meskipun minat atas SBN semakin tinggi, Pemerintah secara hati-hati dan terukur dalam menerbitkan SBN demi memenuhi kebutuhan pembiayaan dan permintaan (demand) di pasar keuangan. Pemerintah mempertimbangkan hal ini karena

bagaimanapun SBN merupakan utang yang mengandung risiko dan biaya sehingga Pemerintah berkomitmen bahwa setiap rupiah uang yang dikeluarkan investor untuk membeli SBN dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah.

Sementara itu untuk pinjaman luar negeri, tren yang terjadi adalah semakin menurunnya peran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah semakin membatasi pinjaman luar negeri untuk menghindari fluktuasi mata uang yang nantinya akan membebani anggaran serta semakin berdayanya dukungan domestik dalam pembangunan dan pembiayaan defisit.

Rasio utang terhadap PDB untuk Maret 2019 sebesar 30,12 persen, sedikit menurun dibandingkan rasio pada bulan Februari 2019 yang besarnya 30,33 persen. Hal ini terjadi karena PDB Indonesia pada bulan Maret 2019

ini mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah utang. Dari segi komposisi, kenaikan terjadi pada SBN domestik sementara Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri relatif stagnan, sejalan dengan upaya pendalaman pasar dan perluasan basis investor dalam negeri.

Strategi pendalaman pasar domestik yang diiringi dengan penerbitan berbagai variasi instrumen SBN mulai menampakkan hasil menggembirakan. Hal ini dapat diukur melalui minat masyarakat yang semakin meningkat

dalam memiliki SBN, dimana secara tidak langsung meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan nasional melalui kepemilikan instrumen investasi tersebut.

Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan melalui SBN dengan menerbitkan jenis SBN retail terutama dalam bentuk tabungan (surat berharga tidak diperdagangkan di pasar sekunder), baik untuk SBN konvensional, yakni Savings Bond Ritel (SBR) maupun SBN Syariah, yakni Sukuk Tabungan (ST). Penerbitan

*(dalam Triliun Rupiah)*

## Posisi Utang Hingga Akhir Maret 2019

	Maret 2018		Maret 2019	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
<b>Total Utang Pemerintah Pusat</b>	4.136,39	100,00%	4.567,31	100,00%
a. Pinjaman	779,69	18,85%	791,19	17,32%
1. Pinjaman Luar Negeri	773,91	18,71%	784,05	17,17%
Bilateral	331,24	8,01%	322,26	7,06%
Multilateral	397,82	9,62%	420,61	9,21%
Komersial	43,66	1,06%	41,18	0,90%
Suppliers	1,19	0,03%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,78	0,14%	7,13	0,16%
b. Surat Berharga Negara	3.356,70	81,15%	3.776,12	82,68%
1. Denominasi Rupiah	2.413,27	58,34%	2.761,18	60,46%
Surat Utang Negara	2.044,84	49,44%	2.295,13	50,25%
Surat Berharga Syariah Negara	368,42	8,91%	466,05	10,20%
2. Denominasi Valas	943,43	22,81%	1.014,94	22,22%
Surat Utang Negara	730,22	17,65%	798,43	17,48%
Surat Berharga Syariah Negara	213,22	5,15%	216,51	4,74%
Rasio Utang thd PDB			30,12%	

kedua instrumen ini dilakukan bergantian, hampir setiap bulan dengan frekuensi masing-masing SBN retail tersebut sebanyak 4 kali. Selain itu juga diterbitkan SBN retail lainnya dalam bentuk efek (surat berharga yang diperdagangkan di pasar sekunder) sebanyak 2 kali, yakni Obligasi Neagra Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (Sukri).

Variasi instrumen pembiayaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap penerbitan SBN, mengingat upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi sekaligus mendukung pembangunan secara langsung melalui pembiayaan APBN. Strategi ini diharapkan dapat menggerakkan masyarakat agar “melek” secara finansial sesuai dengan program financial inclusion dan financial literacy yang menjadi salah satu agenda Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan. Selain itu, instrumen SBN yang variatif amatlah penting agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan portofolio investasinya, yang disesuaikan dengan preferensi tiap individu. Disamping itu, dengan adanya instrumen yang bervariasi serta pengaturan masa penerbitan diharapkan dapat

menghindarkan pasar SBN, terutama ritel, dari kejenuhan.

Melalui kepemilikan SBN ritel, masyarakat dapat menempatkan dana ‘idle’ mereka pada instrumen yang aman sekaligus mendapat imbal hasil yang relatif tinggi, mengingat investor adalah Warga Negara Indonesia. Dengan demikian keuntungan ganda dirasakan oleh warga negara kita, disamping merasakan return dari investasinya juga merasakan hasil-pembangunan yang produktif.

Sementara itu, Pemerintah juga dapat menjalankan prinsip keempat dalam pengadaan pembiayaan yaitu “menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi”, mengingat dana hasil penerbitan tersebut berasal dari dalam negeri sendiri dan bermata uang Rupiah sehingga fluktuasi mata uang dapat dihindari dan pada akhirnya kesinambungan pembangunan dapat terjaga.

Antusiasme masyarakat atas penerbitan SBN ritel Syariah yang merupakan cerminan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pembiayaan oleh Pemerintah terlihat

saat Pemerintah meluncurkan Sukuk Ritel seri 011 (SR011). Sukuk Ritel tersebut mengalami kelebihan permintaan dari target Rp10 triliun terealisasi dengan didapatkannya dana sebesar Rp21,12 triliun dan jumlah investor sebanyak 35.026 orang. Prestasi SBR005 dan ST-003 yang masing-masing diterbitkan pada bulan Januari dan Februari 2019 juga tak kalah baiknya karena mengalami kelebihan permintaan dari para investor.

Melihat keberhasilan tersebut, yang patut dipahami oleh masyarakat terutama investor adalah pengadaan pembiayaan saat ini menerapkan kebijakan pengadaan utang yang fleksibel. Hal ini berarti jika pada awal tahun pengadaan pembiayaan telah mencapai target pembiayaan defisit, maka terdapat kemungkinan Pemerintah untuk tidak menerbitkan instrumen SBN pada akhir tahun. Untuk itu, masyarakat investor didorong untuk berpartisipasi dalam kepemilikan SBN di awal tahun agar masih berkesempatan memiliki SBN serta berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan di tahun 2019 ini.

Sementara itu untuk pinjaman, terutama Pinjaman Luar Negeri dari lembaga donor asing, walaupun

semakin menurun persinya dalam total utang Pemerintah, instrumen ini tetap dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat Pinjaman Luar Negeri memiliki manfaat adanya “transfer of knowledge” dari donor serta dukungan teknis dari ahli-ahli pada lembaga donor, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Dengan menurunnya rasio utang terhadap PDB, hal tersebut dapat mencerminkan bahwa Pemerintah memenuhi pembiayaan utang, terutama melalui utang luar negeri, dilakukan secara hati-hati dan terukur serta terkendali dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik. Selain itu, arah kebijakan pembiayaan utang akan menyesuaikan dengan kebijakan defisit APBN dalam menjaga stabilitas perekonomian di atas lajunya pertumbuhan ekonomi, dimana pembiayaan melalui utang diupayakan untuk dapat berkurang seiring dengan semakin menurunnya defisit APBN



## Kini Siapapun Bisa Belajar Keuangan Negara

Beberapa waktu lalu, sejumlah rekan dari instansi di luar Kemenkeu bertanya hal-hal seputar keuangan negara. Mereka ingin mengetahui bagaimana perkembangan keuangan negara saat ini, di tengah masifnya perubahan teknologi dan sosioekonomi yang dirasakan secara global. Ternyata, antusiasme masyarakat di luar sana untuk belajar dan mengetahui informasi terkait keuangan negara cukup besar.

Sebagai bagian dari pemilik keuangan negara, masyarakat pun berhak dan butuh mengetahui informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara. Tantangannya adalah bagaimana mendistribusikan informasi untuk masyarakat Indonesia yang begitu beragam dan luas.

Layaknya hal yang sudah disinggung rekan kami di atas, saat ini perkembangan teknologi begitu pesat terjadi. Alih-alih menjadi hambatan, teknologi mutakhir ini yang justru bisa menjadi jawaban distribusi informasi terkait keuangan negara yang aksesibel, cepat, mudah, dan terjangkau bagi pegawai Kemenkeu yang tersebar di seluruh pelosok

negeri, juga masyarakat pada umumnya.

Sejak 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mengembangkan portal Kemenkeu Learning Center (KLC) sebagai salah satu produk dari strategi Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu). KLC merupakan wadah ilmu pengetahuan terkait keuangan negara yang dikemas secara digital yang dapat diakses melalui situs [www.klc.kemenkeu.go.id](http://www.klc.kemenkeu.go.id). Melalui KLC, siapa saja dapat mengakses dan mempelajari ilmu keuangan negara tanpa perlu terkendala lokasi, jarak, biaya, ataupun waktu.

Konten yang tersedia di KLC pun cukup kaya dan beragam. Saat ini, KLC sudah memiliki lebih dari 1.700 konten yang terdiri dari video, audio (podcast), dan artikel pembelajaran. Terdapat sejumlah fitur menarik dalam KLC, di antaranya:

**Knowledge Center** yang berisi konten pembelajaran yang dapat diakses secara umum;

**Courses** yang berisi materi

pembelajaran online (e-learning); serta

**Community of Practice** yang merupakan wadah atau komunitas bagi para praktisi yang ahli di bidang tertentu.

Semakin semaraknya konten pembelajaran dari KLC ini tak lepas dari peranan para widyaiswara, dosen, hingga pegawai di sejumlah unit eselon I Kementerian Keuangan yang turut berkontribusi memajukan ilmu keuangan negara dengan mengunggah konten-konten di KLC. Jika menelusuri menu demi menu yang ada di KLC, kita dapat melihat kategorisasi dari setiap konten yang dapat kita akses. Di setiap kategori tersebut, sudah tersedia konten yang siap diakses terkait ilmu keuangan negara seperti bidang perpajakan, bea dan cukai, fiskal, anggaran, perbendaharaan, dan lain sebagainya.

Konten KLC dapat berupa video singkat berdurasi 3-15 menit, yang menyuguhkan para presenter, animasi, gambar, bagan, atau grafis; konten audio atau podcast yang memberikan sensasi belajar auditif seperti radio streaming; atau konten tulisan yang menyajikan sejumlah ulasan informasi keuangan negara dan juga informasi umum lainnya yang menarik untuk diketahui. Melalui beragam media pembelajaran ini, pegawai atau masyarakat umum dapat memilih alternatif penyajian informasi yang paling diminati.

Selain itu, KLC juga berfungsi sebagai wadah e-learning yang mulai digalakkan BPPK, baik sebagai komplementer maupun

substitusi pembelajaran klasik.

Para pegawai dan peserta pelatihan yang terdaftar dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus datang ke lokasi penyelenggaraan. Banyak manfaat positif didapatkan melalui pelaksanaan e-learning di KLC ini, salah satunya yakni efisiensi anggaran. Diperkirakan **transformasi e-learning tersebut dapat menghemat biaya penyelenggaraan pelatihan dan perjalanan dinas (perjadin) hingga 70 persen.**

Dengan manfaat KLC yang semakin luas, hingga kini tercatat lebih dari 37 ribu pengunjung mengakses situs KLC. Selain melalui situs, publik juga dapat mengakses KLC melalui aplikasi Android yang dapat diunduh di Google Playstore. Pada 2018, aplikasi KLC ini berhasil memperoleh 5.471 pengunduh.

Sebagai penikmat era digital, sudah selayaknya kita beranjak ke pengalaman pembelajaran dalam jaringan (online). Selain mudah diakses, media ini juga mudah dibagikan sehingga ilmu keuangan negara dapat lebih tersebar dan dipahami masyarakat luas. Tentunya kita tidak ingin tertinggal dari perkembangan teknologi sekaligus tertinggal dalam mendapatkan ilmu keuangan negara. Mari kita bersama-sama memahami pengelolaan uang negara kita melalui [www.klc.kemenkeu.go.id](http://www.klc.kemenkeu.go.id)

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

## Realisasi APBN s.d. 31 Maret 2018 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBNP	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.894.720,3</b>	<b>333.722,7</b>	<b>17,61%</b>	<b>2.165.111,8</b>	<b>350.100,1</b>	<b>16,17%</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893.523,5	333.462,0	17,61%	2.164.676,5	349.987,4	16,17%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095,5	262.419,8	16,22%	1.786.378,7	279.943,2	15,67%
a. Pajak Dalam Negeri	1.579.395,5	252.576,1	15,99%	1.743.056,9	270.322,8	15,51%
b. Pajak Perdagangan Internasional	38.700,0	9.843,7	25,44%	43.321,8	9.620,5	22,21%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.428,0	71.042,2	25,79%	378.297,9	70.044,2	18,52%
II. HIBAH	1.196,9	260,7	21,78%	435,3	112,7	25,89%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.220.657,0</b>	<b>419.555,3</b>	<b>18,89%</b>	<b>2.461.112,1</b>	<b>452.060,6</b>	<b>18,37%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494,4	233.957,1	16,09%	1.634.339,5	260.735,3	15,95%
1. Belanja K/L	847.435,2	103.140,8	12,17%	855.445,8	128.757,6	15,05%
2. Belanja Non /L	607.059,2	130.816,3	21,55%	778.893,7	131.977,7	16,94%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162,6	185.598,2	24,22%	826.772,5	191.325,3	23,14%
1. Transfer ke Daerah	706.162,6	175.313,8	24,83%	756.772,5	181.237,9	23,95%
2. Dana Desa	60.000,0	10.284,4	17,14%	70.000,0	10.087,4	14,41%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(87.329,5)</b>	<b>(17.368,6)</b>	<b>19,89%</b>	<b>(20.115,0)</b>	<b>(31.384,6)</b>	<b>156,03%</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(325.936,6)</b>	<b>(85.832,6)</b>		<b>(296.000,2)</b>	<b>(101.960,6)</b>	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(0,58)		(1,84)	(0,63)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>325.936,6</b>	<b>152.178,0</b>	<b>46,69%</b>	<b>296.000,2</b>	<b>177.450,0</b>	<b>59,95%</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	399.219,4	150.603,4	37,72%	359.250,6	177.860,0	49,51%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65.654,3)	2,6	0,00%	(75.900,3)	(2.000,0)	2,64%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6.690,1)	(67,5)	1,01%	(2.350,0)	1.585,1	-67,45%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.121,3)	-	0,00%	0,0	-	0,00%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	183,0	41,4	22,62%	15.000,0	4,9	0,03%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN						

*Halaman Ini Sengaja Dikosongkan*

